

TESIS

**PENERAPAN ASAS KESEIMBANGAN DALAM AKTA
PERJANJIAN KREDIT BENTUK NOTARIIL PASCA
DIKELUARKANNYA PERATURAN OTORITAS JASA
KEUANGAN NOMOR 1/POJK.07/2013 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR JASA
KEUANGAN**

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan



PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2018

**PENERAPAN ASAS KESEIMBANGAN DALAM AKTA PERJANJIAN
KREDIT BENTUK NOTARIIL PASCA DIKELUARKANNYA
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 1/POJK.07/2013
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN**

ABSTRAK

**(Reza Khaulan Kharima, 1520122005, Magister Kenotariatan Fakultas
Hukum Universitas Andalas, 114 halaman, Padang, 2018)**

Perjanjian Kredit dengan menggunakan model standar baku/perjanjian baku merupakan model perjanjian yang digunakan di dunia perbankan. Dengan meningkatnya kegiatan berbagai bidang mensyaratkan adanya pelayanan cepat dan tepat tanpa mengabaikan kepatutan dan keadilan semua pihak yang akan terikat pada perjanjian itu. Salah satu cara untuk memberikan pelayanan yang cepat dengan cara mempersiapkan terlebih dahulu blanko perjanjian yang akan digunakan untuk kegiatan transaksional. Perjanjian kredit dengan perjanjian baku di dunia perbankan merupakan cara mencapai tujuan ekonomi yang efisien, praktis, dan cepat. Tetapi bagi konsumen, hal tersebut merupakan pilihan yang tidak menguntungkan, karena konsumen hanya dihadapkan pada pilihan menerima atau menolak perjanjian tersebut. Berdasarkan ketentuan tersebut, muncullah fenomena adanya ketidakseimbangan dalam kontrak/perjanjian. Dengan dibentuknya Badan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pemeriksa dan pengawasan terhadap Perbankan, dan dikeluarkannya POJK No 1/POJK.07/2013 tentang perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan diharapkan dapat mengurangi pelanggaran terhadap perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Permasalahan dan tujuan dari penelitian ini antara lain untuk mengetahui penerapan asas keseimbangan dalam perjanjian kredit perbankan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pasca dikeluarkannya POJK No 1/POJK.07/2013 dan bagaimana akibat hukum terhadap perjanjian kredit yang tidak menerapkan asas keseimbangan. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini yaitu tipe penelitian yuridis empiris. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menemukan bahwa, pertama, bahwa tidak ada perubahan pada perjanjian kredit pada Bank Nagari dan Bank BNI cabang dobi padang pasca dikeluarkannya POJK, karena masih ditemukan klausula-klausula yang bertentangan dengan peraturan per Undang-Undang yang berlaku dan tidak terpenuhinya asas keseimbangan pada perjanjian kredit tersebut. Kedua, akibat hukum terhadap perjanjian kredit yang tidak memenuhi asas keseimbangan akan mendapatkan sanksi sebagaimana yang tercantum dalam pasal 53 POJK No 1 tahun 2013. Namun sampai sejauh ini apabila ditemukan pelanggaran, pihak OJK hanya memberikan sanksi berupa teguran.

Kata Kunci : Perjanjian Kredit, Asas Keseimbangan, Otoritas Jasa Keuangan

**IMPLEMENTATION OF EQUITY PRINCIPLE IN THE DEED OF CREDIT
CONTRACT AFTER THE ISSUANCE OF REGULATION OF OTORITAS**

JASA KEUANGAN NO. 1/POJK.07/2013 ABOUT CONSUMER PROTECTION
IN FINANCIAL SECTOR

ABSTRACT

**(Reza Khaulan Kharima, 1520122005, Master of Notary, Faculty of Law
Andalas University, 114 pages, Padang, 2018)**

The Credit Contract with using standard contract model is an unavoidable model of contract. With the increasing of activities in various fields requiring quick and precise service without disregarding the propriety and justice of all parties that will be bound by the contract. One of the ways to provide quickly service is by preparing a draft of contract that will be used for that transactional activity. The Credit Contract with standard contract in the field of banking transactions is a way to achieve economic goals with efficiency, practical, and quickly. But for consumers it is an unfavorable option, because consumers only had the choice of acceptance or rejection that contract. Under these conditions, it cause the existence of phenomenon of imbalance in contracts. And to solve those problems, Ministry of Finance formed an institution that called *Otoritas Jasa Keuangan* (OJK). With the establishment of the *Otoritas Jasa Keuangan* (OJK) as the inspection and supervisory institution against the Banking, and the issuance of POJK No. 1/POJK.07/2013 about consumer protection in the financial sector is expected to reduce the violation of consumer protection in the financial services sector. Problems and objectives of this research are to find out the implementation of the equilibrium principle in the credit contract based on the existing regulations and after the issuing of POJK No. 1/POJK.07/2013 and how the legal effect on credit contracts that do not apply the equity principle. The research method which used in this research is the juridical empirical research. Sources of legal materials which used are primary, secondary, and tertiary legal materials. Based on the results of the research, the authors found that, First, that the credit contract, especially at Bank Nagari Branch Padang and Bank Negara Indonesia Branch Dobi, Padang is a standard contract that does not contradicted with legislation and equity principle, and basically there is no significant change in the contract before and after the issuance of POJK No. 1 Year 2013. Second, the legal effect of credit contract that does not fulfilled the equilibrium principle will get sanction as mentioned in article 53 of POJK No. 1 Year 2013. But I released this research, if there is violation in financial sector, the sanction that will be given by OJK is kind of reprimands.

Key Words : Credit Contract, Equity Principle, *Otoritas Jasa keuangan*